

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat

dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 (Tentang Pengelolaan Sampah) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 (Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Dampak peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut mengakibatkan bertambahnya sampah.

Pengelolaan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang sekarang dihadapi hampir oleh seluruh kota besar di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dimana peningkatan jumlah timbulan harus diikuti pengelolaan yang optimal sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Timbulan sampah masyarakat Kota Bandung saat ini diproyeksikan sebesar 1.549 ton/hari dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 2.748.732 dan sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) sebesar \pm

1100 ton/hari, dengan komposisi sampah organik sebesar 57% dan anorganik sebesar 43% (Final Report JICA Tahun 2010).

Untuk mengelola sampah Kota Bandung PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan melakukan berbagai inovasi antara lain dengan bank sampah, pengomposan, biodigester, biokonversi dengan maggot dan lain sebagainya agar sampah yang di buang di TPA berkurang. Hingga saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang berlokasi di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan ± 25 Ha. Jarak tempuh dari Kota Bandung ke lokasi TPA ± 45 km sehingga waktu tempuh angkutan per ritasi 3-4 jam. Sampah yang masuk ke TPA Sarimukti berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar mengingat kapasitas volume sampah yang besar dan biaya bahan bakar minyak (BBM). Salah satu cara yaitu dengan menaikkan pendapatan perusahaan dari sektor penagihan. Adapun tarif jasa pengelolaan sampah sesuai dengan Perwal 316 Tahun 2013 sebagai berikut :

Keterangan : DL = Daya Listrik; LT = Luas Tanah; LB = Luas Bangunan

Gambaran Tarif Jasa Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013

Dari hasil evaluasi pada tahun 2015 pendapatan tercapai 86,30 % dari target pendapatan tahun 2015 dengan rincian 70 % dari Kategori Rumah Tinggal, 14 % dari Kategori Komersial, 13 % dari Kategori Pedagang Sektor Informal (PSI), dan 3 % dari Kategori Angkutan Umum.

(<http://pdkebersihan.bandung.go.id/index.php/profil/kondisi-sampah/>)

Dalam hal tersebut kategori rumah tinggal yang memiliki presentase terbesar 70% sesuai dengan target pendapatan, namun sebenarnya dikategori ini terdapat masalah yang sangat merugikan bagi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung seperti Salah satunya didalam Kategori Rumah Tinggal adanya retribusi, realisasi, tertagih dan piutang dalam hal tersebut piutang memuat beberapa permasalahan sebagai contoh dalam retribusi kebersihan kategori rumah tinggal dikenakan tarif Rp 3.000 s.d Rp 20.000 per rumah/perbulan namun realisasinya tidak sesuai banyak sekali warga masyarakat yang tidak membayar dengan berbagai alasan dan membayar tidak sesuai tarif, ini jelas membuat kerugian yang sangat besar dikarenakan piutang tersebut tidak dibayar oleh masyarakat, bahkan masyarakat acuh dan serasa tidak peduli tidak membayar jasa pengelolaan sampah.

Padahal sudah jelas jasa pengangkutan itu memuat beberapa proses Pengangkutan sampah rumah tinggal yakni, sampah yang bersumber dari rumah tinggal diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) secara swakelola oleh RT dan RW setempat. Dari TPS, sampah diangkut oleh truk sampah PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah dipilah, sampah anorganik akan dibawa ke bank sampah. Sementara sampah organik akan diolah menjadi kompos di eks TPA (tempat pembuangan akhir) Jelekong, Kabupaten Bandung.

(<http://pdkebersihan.bandung.go.id/index.php/layanan/layanan-pengangkutan-sampah/>)



GAMBAR 1.1

INFOGRAFIS PENGELOLAAN SAMPAH

(Sumber: PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung)

Dalam permasalahan yang ada penulis menyoroti satu masalah tentang tarif jasa pengelolaan sampah khususnya kategori rumah tinggal. Sesuai dengan PERWAL (PERATURAN WALIKOTA) BANDUNG NO 316 TAHUN 2013 Tentang Pengolaan Sampah dalam pasal 5 Golongan wajib bayar jasa pengelolaan sampah :

- Rumah tinggal
- Komersial/non komersial
- Sosial

d. Pedagang sektor informal; dan

e. Angkutan umum

Adapun penulis mengambil satu kategori yaitu rumah tinggal dikarenakan sesuai data yang di dapat dari PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung jumlah penduduk kota bandung \pm 2-3 juta jiwa, dengan adanya komuter/urban rata-rata setiap orang membuang 0,6 sampah/hari

*(SUMBER: PROF. ENRI DAMANHURI, ITB)

Sedangkan timbunan sampah setiap hari 1.600 ton/hari = 230 x (setara dengan 230 ekor gajah dewasa / setara dengan 1 lapangan sepakbola dengan tinggi timbunan \pm 1 meter, sedangkan komposisi sampah perhari 0.2% logam 57% organik 7,4% kain 10,6% kertas 0,1% B3 18,5% plastik karet 6,2% lain-lain.

*(SUMBER: *FINAL REPORT JICA* 2010)

Tarif jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal sesuai dengan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 316 TAHUN 2013

Kategori Rumah Tinggal :

Kelas 1 (DL. 450 VA, LT. 60 M², LB. 27 M²) sebesar Rp. 3.000,00/bulan

Kelas 2 (DL. 900 - 1.300 VA, LT > 60-100 M², LB. > 27-60 M²) sebesar Rp. 5.000,00/bulan

Kelas 3 (DL. > 1.300 - 2.200 VA, LT > 100-200 M², LB. > 60-150 M²) sebesar Rp. 7.000,00/bulan

Kelas 4 (DL. > 2.200 - 3.600 VA, LT > 200-350 M², LB. > 150-250 M²) sebesar Rp. 10.000,00/bulan

Kelas 5 (DL. > 3.600 – 6.600 VA, LT > 350-500 M², LB. > 250-350 M²) sebesar Rp. 15.000,00/bulan

Kelas 6 (DL. > 6.600 VA, LT. > 500 M², LB. > 350 M²) sebesar Rp. 20.000,00/bulan

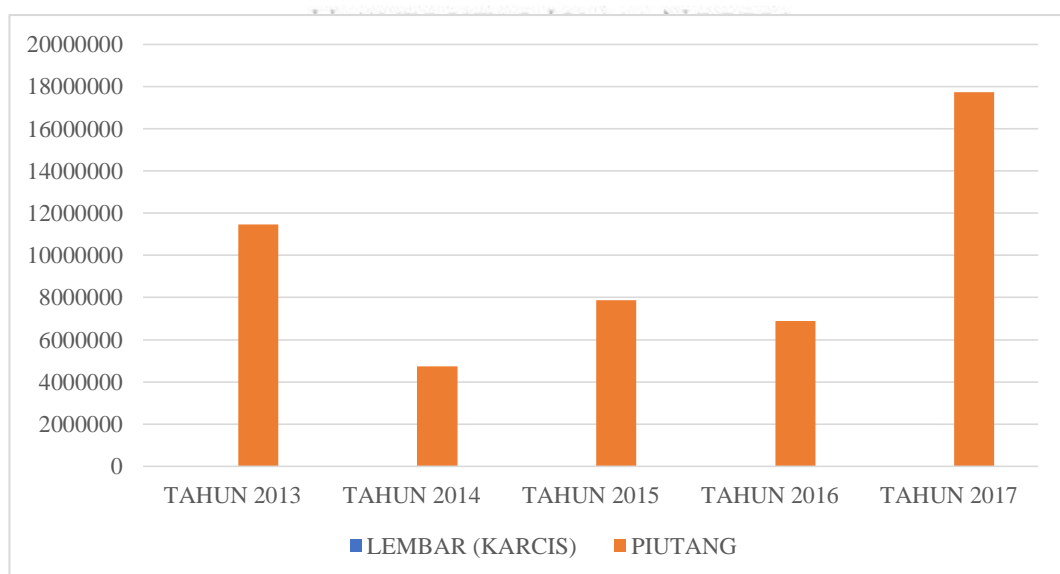
#keterangan : DL=Daya Listrik, LT=Luas Tanah, LB=Luas Bangunan

Namun dalam hal ini peneliti akan menyoroti masalah piutang dalam tarif jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal karena sangat mendominasi sekali dalam komposisi pembuangan sampah saja terbesar dibanding kategori lain, dan peneliti mengambil kecamatan mandalajati sebagai studi kasus permasalahan piutang pada PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung adapun datanya sebagai berikut :

Data laporan piutang PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung tahun 2012-2016 kecamatan mandalajati :

TABEL 1.1

DATA PIUTANG KECAMATAN MANDALAJATI



KETERANGAN :

2013 sebesar 2.672 lembar (karcis) Rp. 11.455.000,00
 2014 sebesar 1.052 lembar (karcis) Rp. 4.740.000,00
 2015 sebesar 1.630 lembar (karcis) Rp. 7.872.000,00
 2016 sebesar 1.473 lembar (karcis) Rp. 6.877.000,00
 2017 sebesar 4.268 lembar (karcis) Rp. 17.718.000,00

Dilihat dari masalah tersebut, PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan mengalami permasalahan keuangan yang menyangkut aset lancar (piutang) dalam pengelolaan sampah kategori rumah tinggal, jelas hal ini sangat merugikan karena PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan sendiri tidak bisa melakukan tindakan apapun, sebagai contoh jika PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan mencabut ijin seperti tidak mengangkut sampah di rumah-rumah tidak akan membuat masyarakat sadar namun akan muncul permasalahan baru, masyarakat akan membuang sampah sembarangan bahkan bisa saja ke sungai.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan konsep analisis piutang, dan sesuai dengan fenomena yang diharapkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Piutang Tarif Jasa dalam Pengelolaan Sampah Kategori Rumah Tinggal pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (di Kecamatan Mandalajati)”***

B. Fokus Masalah

Perusahaan Daerah Kebersihan sebagai perusahaan yang ditangani oleh pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun berbagai kendala yang datang harus dapat ditangani oleh PD (Perusahaan Daerah)

Kebersihan, sehingga untuk membantu memecahkan permasalahan ini, penulis perlu mengetahui beberapa hal yang penulis belum ketahui. Penelitian ini berusaha memahami beberapa aspek mengenai kinerja keuangan, pada hal ini dibatasi pada kinerja keuangan PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung.

Beberapa pernyataan utama yang akan dicoba dijawab melalui penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perusahaan untuk mengumpulkan/menagih piutang ?
2. Bagaimana cara perusahaan mengelola piutang khusus kategori rumah tinggal dalam pengelolaan sampah?

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis piutang tarif jasa dalam pengelolaan sampah kategori rumah tinggal pada PD Kebersihan Kota Bandung di Kecamatan Mandalajati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktiva lancar (piutang) pada Perusahaan Daerah Kebersihan dalam pengelolaan sampah kategori rumah tinggal di Kota Bandung di Kecamatan Mandalajati.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai piutang di perusahaan. Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

b. Bagi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja keuangan khususnya piutang kategori rumah tinggal dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikannya.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan sampah memang banyak sekali menimbulkan masalah dan sampai sekarangpun belum dapat terselesaikan adapun dalam kategori rumah tinggal yang menurut data dari PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung komposisi pembuangan sampah terbesar sekota bandung ini sudah jelas banyak menimbulkan masalah, salah satu masalah yang peneliti soroti adalah

pembayaran retribusi jasa pengelolaan sampah yang sering sekali masyarakat mengabaikan, sedangkan ini justru sangat penting karena dari retribusi tersebut tentunya PD kebersihan akan meningkatkan pelayanan seperti alat-alat mendaur ulang sampah sehingga tidak terlalu menumpuk sampah dan dapat diminimalisir peredarannya.

Retribusi sampah adalah sumber pendapatan satu-satunya dari PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung sudah sangat jelas jika masyarakat enggan membayar akan terasa sangat rugi bagi PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan. Salah satu faktor masyarakat enggan membayar dikarenakan masyarakat merasa dirugikan karena harus membayar 2 kali kepada RT/RW dan PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan namun sebenarnya memang ada pemisahan antara swakelola RT/RW dengan PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan sampah yang diangkut dari rumah menuju pengangkutan ke TPS (Tempat Pemungutan Sampah) diangkut berdasarkan swakelola RT/RW jadi sudah jelas uang retribusinya untuk membayar jasa orang yang mengangkut sampah tersebut, namun pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pemungutan Sampah) menuju ke TPA (Tempat Pemungutan Akhir) itu tanggung jawab PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan. Dengan diangkut oleh truck pengangkut sampah hingga ke TPA (Tempat Pemungutan Akhir) jadi sudah jelas memang mekanismenya seperti itu namun masih saja terjadi masyarakat yang enggan membayar karena berbagai alasan dan terkadang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh PERWAL (PERATURAN WALIKOTA) NO 316 TAHUN 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, sebenarnya jika sesuai dengan aturan tarif di peraturan

walikota juga belum maksimal pendapatan PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan karena kalo dilihat dari daya listrik satu rumah terkadang ada beberapa kepala keluarga dan yang memiliki kamar kost yang disewakan hanya satu daya listrik jelas sangat dirugikan karena yang menempati rumah tidak hanya satu keluarga namun beberapa keluarga jelas pembuangan sampah perhari juga akan meningkat, dengan adanya permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa permasalahan piutang masyarakat kepada PD (Perusahaan Daerah) kebersihan perlu di Analisis lebih lanjut sehingga dapat menemukan solusi dan meminimalisir permasalahannya.



GAMBAR 1.2

ALUR PENGANGKUTAN SAMPAH

(Sumber: PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan Kota Bandung)

Analisis piutang penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling terkait. Pengalaman menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menagih semua piutangnya. Meskipun keputusan mengenai kolektabilitas (ketertagihan) dapat dibuat kapan saja, kolektabilitas piutang dalam satu kelompok hanya dapat di estimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dengan penyisihan yang layak berdasarkan ekonomi saat ini, industri dan kondisi debitur. Risiko analisis ini adalah pengalaman masa lalu mungkin bukan alat prediksi yang

layak atas kerugian masa depan, atau mungkin kita gagal mencerminkan kondisi terkini. Kerugian piutang dapat menjadi sangat berarti dan mempengaruhi baik aset lancar serta laba bersih sekarang dan masa depan.

Dalam praktiknya perusahaan melapurkan piutang sebesar nilai realisasi bersih (*net realizable value*) jumlah piutang total dikurangi penyisihan piutang tak tertagih (kadang-kadang disebut juga piutang sangsi atau piutang ragu-ragu) manajemen mengestimasi penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kondisi pelanggan ekspektasi ekonomi dan industri, dan kebijakan penagihan. Piutang tak tertagih dihapus mengurangi penyisihan (sering kali dilaporkan sebagai pengurangan piutang di neraca), dan ekspektasi kerugian dicakup dalam beban operasi periode berjalan. Penilaian kualitas laba seringkali di pengaruhi oleh analisis piutang dan oleh kolektabilitasnya. Analisis harus peka terhadap perubahan pada akun penyisihan. Akun ini dihitung relatif berdasarkan penjualan, piutang atau kondisi industri dan pasar. (Subramanyam, 2014:275)

Piutang menurut **K.R SUBRAMANYAM dan JOHN J. WILD** (2014:276) (*receivables*) merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. **Piutang usaha** (*account receivables*) mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau di tagih dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. (Subramanyam, 2014:275)

Analisis Piutang K.R SUBRAMANYAM dan JOHN J. WILD meskipun opini wajar tanpa pengecualian dari auditor memberikan keyakinan akan validitas dan penilaian piutang, analisis kita harus mengakui kemungkinan adanya kesalahan prosedur atau penilaian audit. Kita juga harus waspada terhadap insentif manajemen (dan auditor) dalam melaporkan laba dan aset. Dengan memperhatikan hal tersebut, terdapat pertanyaan penting dalam analisis piutang kita. (Subramanyam, 2014:276)

Risiko kolektabilitas (ketertagihan). Sebagian besar penagihan piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu, meskipun penyisihan dilakukan untuk ekonomi terkini yang membaik, industri dan kondisi debitur. Dalam praktiknya, manajemen seringkali lebih mementingkan pengalaman masa lalu hanya karena kondisi ekonomi dan industri sulit di prediksi. Analisis harus mempertimbangkan bahwa meskipun pendekatan dengan rumus untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih mudah dan praktis, perhitungan ini mencerminkan penilaian mekanik yang menghasilkan kesalahan. Analisis harus bersandar pada pengetahuan kita mengenai kondisi industri untuk dapat menilai penyisihan piutang dengan andal.

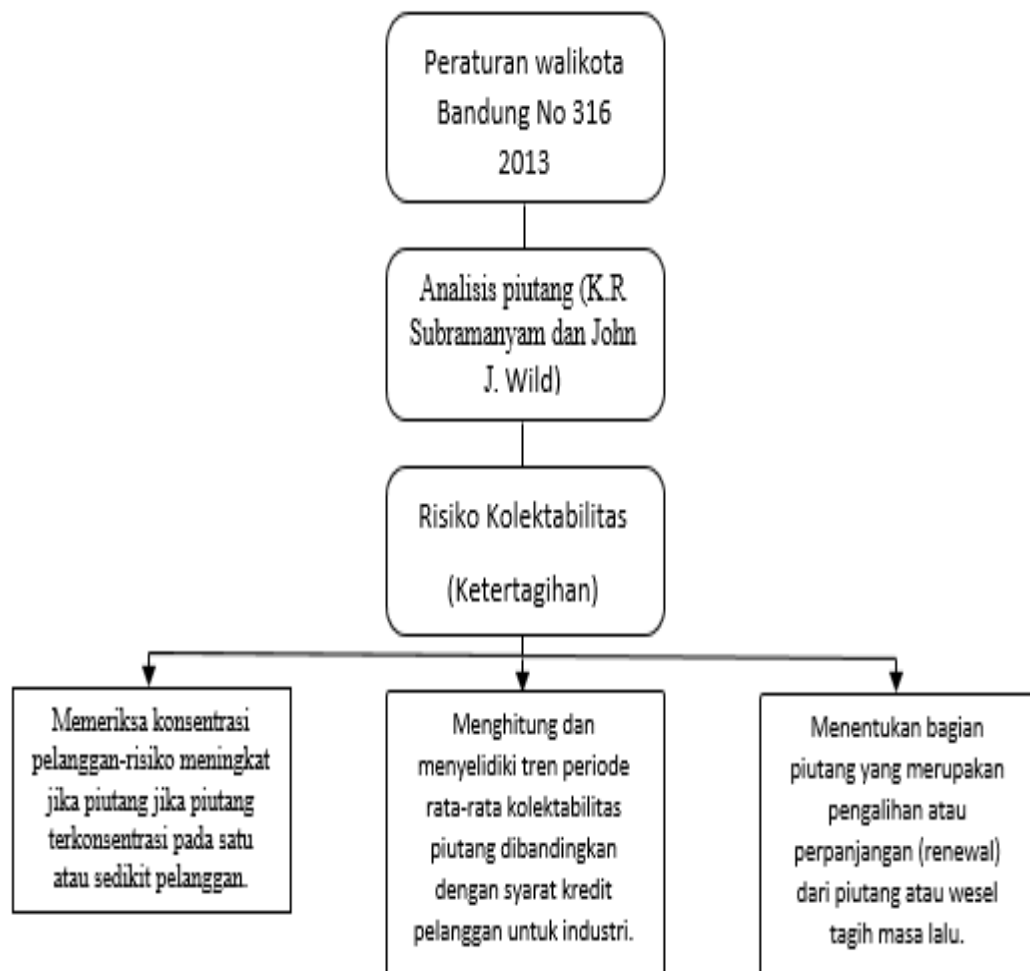
Informasi penuh untuk menilai resiko kolektabilitas biasanya tidak dicakup dalam perusahaan, alat analisis untuk memeriksa kolektabilitas mencakup :

1. Memeriksa konsentrasi pelanggan-resiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan.

Piutang seharusnya tidak terkonsentrasi kepada satu pelanggan sehingga tingkat ketertagihan piutang ini risikonya kecil dapat tertagih jika hanya terkonsentrasi pada satu pelanggan, akan tetapi piutang harus difokuskan kepada semua pelanggan dikarenakan perusahaan jasa dan jasa yang perusahaan berikan semua masyarakat menikmati dampaknya, oleh karena itu resiko ketertagihan piutang akan besar dapat tertagih jika semua pelanggan difokuskan dalam ketertagihannya.

2. Menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan (renewal) dari piutang atau wesel tagih masa lalu.

Dalam penentuan piutang pengalihan/perpanjangan sesuai dengan waktu estimasi piutang tak tertagih setiap satu tahun sekali piutang di perpanjang dan setiap tiga tahun piutang akan dihapuskan sesuai dengan syarat yang berlaku diperusahaan tersebut jika estimasi piutang tak tertagih benar-benar terjadi.



Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran